

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DESA TEKULAI BUGIS MENGUNAKAN RASIO KEMANDIRIAN, PERTUMBUHAN DAN EFEKTIVITAS

Yulia Citra¹, Raju Maulana², Muhammad Fauzan³

^{1,2,3}Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

*e-mail: citrally.00@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 03 07, 2026

Revision 03 16, 2026

Received 03 31, 2026

Keywords:

Kinerja Keuangan
Rasio Kemandirian
Rasio Efektivitas
Rasio Pertumbuhan
Pemerintah Desa

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Desa Tekulai Bugis Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis rasio keuangan terhadap data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024–2025. Data diperoleh melalui dokumentasi laporan keuangan desa yang kemudian dianalisis menggunakan perhitungan rasio kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan desa berada pada kategori sangat rendah, yaitu sebesar 0,02% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 0,03% pada tahun 2025, yang mengindikasikan tingginya ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja yang efektif dengan capaian 100% pada tahun 2024 maupun 2025, yang berarti realisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, rasio pertumbuhan PADes menunjukkan tren positif, yaitu 170,07% pada tahun 2024 dan 21,62% pada tahun 2025, meskipun secara nominal masih relatif kecil. Kesimpulannya, kinerja keuangan Desa Tekulai Bugis menunjukkan efektivitas yang baik dalam pencapaian target pendapatan, namun tingkat kemandirian keuangan masih sangat rendah sehingga desa masih bergantung pada dana transfer. Diperlukan optimalisasi potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk meningkatkan kemandirian fiskal desa.

1. INTRODUCTION

Background Problem

Kinerja keuangan daerah menjadi titik fokus dalam pengelolaan sumber daya di tingkat lokal, terutama di era otonomi daerah yang memberikan desa wewenang lebih besar dalam mengelola anggaran dan sumber daya. Dengan adanya desentralisasi, desa diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi desa dalam hal pengelolaan keuangan sering kali cukup kompleks, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kinerja keuangan untuk memaksimalkan potensi yang ada.

Di satu sisi, desa memiliki sumber daya yang beragam, mulai dari potensi alam, tenaga kerja, hingga dukungan dari pemerintah. Namun, di sisi lain, masih banyak desa yang menghadapi keterbatasan dalam hal kapasitas manajerial, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, serta akses terhadap informasi dan teknologi. Hal ini mengakibatkan pengelolaan anggaran yang kurang efektif dan efisien, serta ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, analisis kinerja keuangan daerah menjadi penting untuk mengevaluasi seberapa baik desa dalam mengelola anggaran dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi apakah suatu rencana / kegiatan yang direncanakan sejalan dengan rencana, dan yang lebih penting, apakah telah berhasil mencapai target saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penentuan indikator kinerja yang memberikan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan satuan kerja sektor publik untuk memantau kinerjanya dalam menciptakan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran Kinerja membantu pembuat keputusan memantau dan meningkatkan kinerja dan fokus Persyaratan tujuan organisasi untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas publik.

Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja pemerintah desa mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah desa karena dengan analisis kinerja ini pemerintah desa dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya selama periode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan, pemerintah desa dapat melihat bagaimana pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya [1]. Salah satu alat analisis untuk melakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Penggunaan rasio keuangan daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi [2]. Rasio kemandirian keuangan desa menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai kinerja keuangan. Rasio ini mencerminkan kemampuan desa untuk membiayai kegiatan dan program-program pembangunan menggunakan sumber pendapatan asli desa (PAD). Tingginya rasio kemandirian menunjukkan bahwa desa mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat atau daerah. Sebaliknya, rendahnya rasio kemandirian dapat mengindikasikan perlunya intervensi atau dukungan tambahan dari pemerintah untuk membantu desa mengembangkan kapasitas keuangannya.

Selain itu, rasio efektivitas juga menjadi elemen penting dalam analisis kinerja keuangan. Rasio ini mengukur sejauh mana penggunaan anggaran dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mencerminkan efisiensi dan efektivitas dari setiap pengeluaran. Desa yang mampu menggunakan anggarannya secara efektif akan dapat memberikan layanan publik yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang rasio-rasio ini sangat penting bagi pengelola keuangan desa untuk merencanakan dan melaksanakan anggaran secara optimal. Dan Dalam praktiknya, rasio pertumbuhan salah satu yang dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan pendapatan daerah, pertumbuhan belanja, maupun pertumbuhan komponen belanja tertentu seperti belanja operasi dan belanja modal. Rasio pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan dibandingkan periode sebelumnya, sedangkan rasio pertumbuhan yang negatif mengindikasikan penurunan kinerja atau adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejak diberlakukannya kebijakan Dana Desa, pemerintah desa, termasuk Desa Tekulai Bugis, memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tingkat kemandirian fiskal desa yang relatif rendah. Desa Tekulai Bugis

masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dan daerah, seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, sementara kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap total pendapatan desa belum optimal. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kemampuan desa dalam menggali potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendanaan mandiri.

Selain itu, fenomena pertumbuhan keuangan Desa Tekulai Bugis dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi. Pertumbuhan pendapatan dan belanja desa tidak selalu menunjukkan tren yang stabil, yang mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Pertumbuhan belanja yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan fiskal desa, khususnya dalam pembiayaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Fenomena lainnya terlihat pada tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam realisasi pendapatan dan pelaksanaan program kerja desa. Meskipun target pendapatan desa telah ditetapkan dalam APBDes, realisasi pendapatan belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan, terutama dari sumber PADes. Hal ini berdampak pada keterlambatan atau penyesuaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan Desa Tekulai Bugis masih perlu ditingkatkan agar penggunaan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan latar belakang dan fenomena tersebut, diperlukan analisis kinerja keuangan Desa Tekulai Bugis secara komprehensif menggunakan rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas.

Untuk memperkuat fenomena tersebut, berikut disajikan data awal keuangan Desa Tekulai Bugis berdasarkan komponen yang digunakan dalam perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan.

Table 1 Informasi Pendapatan Desa

No	Komponen	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pendapatan Asli Desa (PADes)	Rp370.000	Rp450.000
	Pendapatan Transfer	Rp1.494.672.800	Rp1.337.325.611
2	Anggaran PADes	Rp370.000	Rp450.000
	Realisasi PADes	Rp370.000	Rp450.000
3	PADes Tahun Sebelumnya	Rp.137.000	Rp370.000
	PADes Tahun Berjalan	Rp370.000	Rp450.000

Sumber: laporan keuangan desa

Berdasarkan data awal tersebut, terlihat bahwa Pendapatan Asli Desa Tekulai Bugis masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan desa masih didominasi oleh dana transfer, sedangkan kontribusi PADes terhadap pendapatan desa belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja keuangan Desa Tekulai Bugis dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Dengan latar belakang dan fenomena tersebut, diperlukan analisis kinerja keuangan Desa Tekulai Bugis secara komprehensif menggunakan rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas.

Problem Formulation

Berdasar latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja keuangan Desa Tekulai Bugis jika di ukur menggunakan rasio kemandirian, pertumbuhan dan efektivitas?

Research Purposes

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya , maka tujuan diadakan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana kinerja keuangan Desa Tekulai Bugis jika di ukur menggunakan rasio kemandirian, pertumbuhan dan efektivitas.

2. LITERATURE REVIEW

Kinerja keuangan

Menurut [3] Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan peraturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran kondisi keuangan dan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangannya, yang dapat dinilai melalui analisis laporan keuangan, khususnya

dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai tingkat kesehatan, efektivitas, serta perkembangan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu [4] [5].

Kinerja keuangan menunjukkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan, khususnya melalui analisis indikator keuangan. Dalam konteks pemerintah daerah, kinerja keuangan mencerminkan kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, mendukung pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, dengan meminimalisir ketergantungan pada pemerintah pusat. Pengukuran kinerja ini penting untuk memperbaiki kinerja, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan akuntabilitas publik, serta untuk menilai kemandirian keuangan, efektivitas, efisiensi, dan kontribusi sumber pendapatan daerah selama periode tertentu.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD secara efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Penilaian kinerja keuangan daerah umumnya dilakukan melalui analisis rasio keuangan, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, keserasian belanja, dan pertumbuhan, untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran daerah mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat [6] [7] [8]. Menurut Ibnu Syamsi, (1986: 199) dalam [9] Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu kemampuan structural organisasinya, kemampuan aparatur Pemerintah Daerah, Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah [9].

1. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan keuangan Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga semakin tinggi rasio kemandirian menunjukkan semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal, terutama pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. [10] [11] [12]

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer dan pinjaman daerah. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah

daerah mampu memenuhi kebutuhan belanja publik dan pembangunan daerah melalui sumber pendapatan internal yang dimilikinya [11][12].

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dianalisis melalui rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Interpretasi tingkat kemandirian tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam pola hubungan instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif sebagaimana digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah oleh Mahmudi (2019). Kerangka analisis ini tetap relevan digunakan dalam penelitian keuangan daerah karena sejalan dengan arah regulasi pengelolaan keuangan daerah terbaru, yaitu PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, dan UU No. 1 Tahun 2022.

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Rendah sekali	0% – 25%
Rendah	>25% – 50%
Sedang	>50% – 75%
Tinggi	>75% – 100%

Sumber: Mahmudi (2019), diadaptasi dari klasifikasi rasio kemandirian keuangan daerah.

Rasio efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan [2]. Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2020). Manfaat dari menghitung Rasio Efektivitas bagi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja: Rasio ini membantu pemerintah dalam mengevaluasi kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
2. Pengambilan Keputusan: Dengan mengetahui efektivitas penggunaan anggaran, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait perencanaan dan alokasi sumber daya.
3. Akuntabilitas dan Transparansi: Rasio efektivitas meningkatkan akuntabilitas publik dengan memberikan informasi yang jelas tentang hasil dari penggunaan dana publik.
4. Peningkatan Layanan Publik: Dengan menganalisis rasio ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam program yang dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas yang diperoleh, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan PAD. Adapun rumus rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk memudahkan interpretasi hasil perhitungan rasio efektivitas PAD, diperlukan kriteria penilaian sebagai dasar untuk menentukan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan PAD. Kriteria tersebut digunakan untuk mengelompokkan hasil rasio ke dalam kategori sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, atau tidak efektif. Rasio efektivitas PAD digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan PAD yang telah ditetapkan, sehingga semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka semakin baik kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan daerahnya (Julaeha & Penangsang, 2024; Pardede, 2024; Sigiro, 2024). Adapun klasifikasi tingkat efektivitas PAD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah

Persentase Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% – 99%	Cukup Efektif
75% – 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

Rasio Pertumbuhan

Menurut [13], Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa dari tahun ke tahun, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Rasio ini memberikan gambaran apakah dalam beberapa periode anggaran pemerintah desa mampu meningkatkan pendapatan, khususnya pendapatan asli desa, serta mengelola pertumbuhan belanja secara proporsional. Dengan demikian, rasio pertumbuhan dapat digunakan untuk menilai arah perkembangan kinerja anggaran pemerintah desa secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa dari satu tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya, digunakan rasio pertumbuhan. Rasio ini dapat diterapkan pada komponen pendapatan maupun belanja, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai peningkatan atau penurunan realisasi anggaran dalam beberapa periode. Adapun rumus rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{rasio pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Tahun Berjalan} - \text{Realisasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai perkembangan kinerja keuangan daerah dari satu periode ke periode berikutnya, khususnya dalam melihat peningkatan atau penurunan PAD, total pendapatan daerah, belanja operasi, dan belanja modal. Pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa daerah mampu mempertahankan serta meningkatkan kinerja keuangannya, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan bahwa daerah belum optimal dalam mengembangkan potensi keuangannya secara berkelanjutan [14][15][16].

Hipotesis

1. Diduga Kinerja Keuangan Desa Tekulai Bugis diukur dengan Rasio kemandirian memperoleh kriteria yang belum mandiri.
2. Diduga Kinerja Keuangan Desa Tekulai Bugis diukur dengan Rasio Efektivitas memperoleh kriteria yang efektif.
3. Diduga Kinerja Keuangan Desa Tekulai Bugis diukur dengan Rasio pertumbuhan berada pada kondisi belum bertumbuh.

3. RESEARCH METHOD

Desain Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan data yang bersifat aktual dan dilanjutkan dengan menganalisis untuk mencari kesimpulan dari variabel yang diteliti.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Desa Tekulai Bugis Kecamatan Tanah merah Kabupaten Indragiri Hilir, Dengan waktu Penelitian dilaksanakan terhitung dari Desember 2025 sampai Selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan daerah pada Kantor Desa Tekulai Bugis Kecamatan Tanah merah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2024.- 2025.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh data populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Teknik sampling jenuh.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 4. Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Skala Pengukuran
1	Kinerja Keuangan (Y)	Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan [17]	Rasio Keuangan Daerah
2	Rasio Kemandirian (X1)	Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal, seperti transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin baik kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri [18]	Rasio Keuangan
3	Rasio Efektivitas (X2)	Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah/desa dalam merealisasikan pendapatan asli daerah/desa yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli daerah/desa yang telah dianggarkan [2].	Rasio keuangan
4	Rasio Pertumbuhan (X3)	rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya	Rasio keuangan

Sumber: Data Olahan Penelitian

Pengumpulan Data

1. Jenis data

a. Data kualitatif

Menurut [19], data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, kalimat, narasi, gambar, atau keterangan lain yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian, baik berupa sejarah, kondisi umum, struktur organisasi, maupun informasi lain yang berkaitan dengan karakteristik objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data kualitatif yang digunakan meliputi sejarah singkat Desa Tekulai Bugis, gambaran umum desa, struktur organisasi pemerintahan desa, serta informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

b. Data kuantitatif

Menurut [19], data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan, sehingga dapat diolah dan dianalisis menggunakan perhitungan statistik atau rumus tertentu. Data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena berdasarkan ukuran numerik yang objektif. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan adalah laporan keuangan Desa Tekulai Bugis periode 2024–2025, yang meliputi data pendapatan, belanja, pembiayaan, serta komponen keuangan lain yang diperlukan untuk menganalisis kinerja keuangan desa.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian oleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, maupun instrumen penelitian lainnya yang dirancang sesuai dengan kebutuhan penelitian [20].

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya dan bukan dikumpulkan secara langsung dari responden. Data tersebut dapat berupa dokumen, laporan, publikasi ilmiah, maupun data statistik yang berfungsi untuk melengkapi dan mendukung data primer dalam penelitian [20].

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan peneliti mencari informasi yang berhubungan dengan masalah, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen yang tersedia pada instansi atau organisasi, seperti laporan keuangan, laporan program kerja, arsip kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh dari sumber lain [20].

b. Studi pustaka

Menurut [20], studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dokumen, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi, konsep, dan landasan teoritis yang dapat mendukung pemecahan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai buku referensi, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh dasar teoritis, memperkuat kerangka pemikiran, dan mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisis Data

1. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung secara signifikan pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal, sehingga menunjukkan kemampuan fiskal daerah yang semakin mandiri.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman (Pendapatan Daerah)}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil perhitungan rasio tersebut selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemampuan keuangan dan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana ditunjukkan berikut ini :

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Sangat Rendah	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

2. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efektivitas yang dicapai, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-

sumber pendapatan daerah [21].

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD Daerah}}{\text{Anggaran PAD Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian tingkat efektivitas kinerja keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 yang masih banyak digunakan sebagai pedoman dalam penelitian keuangan daerah di Indonesia.

Kriteria Efektivitas	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	≤ 60%

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya dari satu periode ke periode berikutnya melalui peningkatan pendapatan maupun pengelolaan belanja daerah [18].

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian tingkat pertumbuhan daerah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 yang masih banyak digunakan sebagai pedoman dalam penelitian keuangan daerah di Indonesia.

Kriteria Pertumbuhan	Pertumbuhan (%)
Sangat Baik	> 10%
Baik	5% – 10%
Cukup	0% – <5%
Stagnan	0%
Kurang Baik	< 0%

4. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Research result

Berdasarkan data Realisasi APBDes Desa Tekulai Bugis Tahun Anggaran 2024, diketahui bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dianggarkan sebesar Rp370.000 telah terealisasi sepenuhnya sebesar Rp370.000. Sementara itu, realisasi Pendapatan Transfer mencapai Rp1.494.672.800, sehingga total realisasi pendapatan desa pada tahun 2024 sebesar Rp1.495.042.800.

1. Rasio Kemandirian 2024

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{370.000}{1.494.672.800} \times 100\% = 0,02 \%$$

2. Rasio Efektivitas 2024

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{370.000}{370.000} \times 100\% = 100 \%$$

3. Rasio Pertumbuhan 2024

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{370.000 - 137.000}{137.000} \times 100\% = 170,07\%$$

Data keuangan Desa Tekulai Bugis Tahun 2025:

Pendapatan Asli Desa (PAD) 2025

Pendapatan Asli Desa (PAD) Tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp450.000 dan terealisasi sebesar Rp450.000. Sementara itu, Pendapatan Transfer Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.337.325.611. Dengan demikian, total realisasi Pendapatan Desa Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.337.325.611.

1. Rasio Kemandirian 2025

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{450.000}{1.337.325.611} \times 100\% = 0,03 \%$$

2. Rasio Efektivitas 2025

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{450.000}{450.000} \times 100\% = 100 \%$$

3. Rasio Pertumbuhan PAD (2024–2025)

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{450.000 - 370.000}{370.000} \times 100\% = 21,62\%$$

Discussion

Untuk mempermudah interpretasi terhadap hasil perhitungan rasio keuangan Desa Tekulai Bugis tahun 2024–2025, berikut disajikan ringkasan hasil rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan beserta kriteria/kondisinya.

5. Tabel Hasil Rasio Kinerja Keuangan Desa Tekulai Bugis Tahun 2024–2025

No	Jenis Rasio	Hasil	Kriteria
1	Rasio Kemandirian 2024	0,02%	Sangat rendah
2	Rasio Efektivitas 2024	100%	Efektif
3	Rasio Pertumbuhan PADes 2023-2024	170,07%	Positif
4	Rasio Kemandirian 2025	0,03%	Sangat rendah
5	Rasio Efektivitas 2025	100%	Efektif
6	Rasio Pertumbuhan PADes 2024-2025	21,62%	Positif

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2024, rasio kemandirian keuangan Desa Tekulai Bugis sebesar 0,02%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan desa berada pada kategori sangat rendah dan termasuk dalam pola hubungan instruktif. Artinya, pemerintah desa masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi ini terlihat dari perbandingan yang sangat besar antara Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp370.000 dengan pendapatan transfer yang mencapai lebih dari Rp1,4 miliar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan desa dalam menggali potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan mandiri masih sangat terbatas, sehingga pembiayaan pembangunan desa masih didominasi oleh dana transfer.

Selanjutnya, rasio efektivitas tahun 2024 sebesar 100% menunjukkan bahwa realisasi PADes telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan PADes pada tahun tersebut dapat dikategorikan efektif. Meskipun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan keuangan desa secara keseluruhan, karena nilai PADes secara nominal masih tergolong sangat kecil. Artinya, capaian efektivitas lebih menunjukkan keberhasilan pemerintah desa dalam merealisasikan target PADes, tetapi belum menunjukkan kemampuan desa dalam meningkatkan sumber pendapatan asli secara signifikan. Sementara itu, rasio pertumbuhan tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan PADes dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut masih belum cukup untuk mengubah struktur pendapatan desa yang tetap didominasi oleh dana transfer. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PADes belum memberikan kontribusi besar terhadap kemandirian keuangan desa.

Berdasarkan hasil analisis tahun 2025, rasio kemandirian keuangan Desa Tekulai Bugis sebesar 0,03%. Nilai tersebut masih berada pada kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan PADes dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat ketergantungan desa terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Struktur keuangan desa masih didominasi oleh pendapatan dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga kemampuan desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri belum mengalami perubahan yang signifikan.

Rasio efektivitas tahun 2025 sebesar 100% menunjukkan bahwa realisasi PADes telah sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa telah mampu merencanakan dan merealisasikan pendapatan sesuai dengan anggaran. Namun, seperti pada tahun sebelumnya, efektivitas

ini masih bersifat administratif karena nilai PADes yang diperoleh masih relatif kecil. Dengan demikian, meskipun realisasi PADes telah mencapai target, kontribusinya terhadap total pendapatan desa masih belum besar.

Sementara itu, rasio pertumbuhan PADes tahun 2025 sebesar 21,62% menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, meskipun secara nominal peningkatan tersebut masih tergolong kecil. Pertumbuhan positif ini dapat menjadi sinyal awal bagi pemerintah desa untuk terus mengembangkan potensi ekonomi lokal, mengoptimalkan aset desa, serta meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Desa Tekulai Bugis tahun 2024–2025 menunjukkan adanya konsistensi dalam efektivitas realisasi PADes dan peningkatan pada aspek pertumbuhan PADes. Namun, tingkat kemandirian keuangan desa masih sangat rendah karena struktur pendapatan masih didominasi oleh dana transfer. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu lebih fokus pada strategi peningkatan PADes, seperti pengembangan potensi ekonomi lokal, optimalisasi pengelolaan aset desa, peningkatan sektor usaha masyarakat, serta penguatan peran BUMDes agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi secara bertahap.

BIBLIOGRAPHY

- [1] Y. S. Eva, *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng*. Skripsi Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- [2] H. Susanto, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram," *J. Ilmu Manaj. dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, ISSN, pp. 2477 – 1767, 2019.
- [3] et al. Sukmawati V. D., "Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Analisis Rasio Profitabilitas," *J. Ilm. Akunt. dan Bisnis*, vol. 7, no. 2, pp. 189–206, 2022, [Online]. Available: <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi>
- [4] Y. Arsita, "Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan PT Sentul City, Tbk," *J. Manaj. Pendidik. dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 1, pp. 152–167, 2021, doi: 10.38035/jmpis.v2i1.436.
- [5] V. Hidayat, L. C. Harsana, A. Gabriella, and D. Cahayasari, "Analisis kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio pada PT. Jakarta International Hotels & Development Tbk (JIHD)," *AKUA J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 1, pp. 49–58, 2025, doi: 10.54259/akua.v4i1.3535.
- [6] A. Sessu and Imaduddin, "Financial ratio analysis of regional revenue and expenditure budgets on financial performance in regional governments," *J. Econ. Resour.*, 2022, doi: 10.33096/jer.v.
- [7] A. E. Sarwono and H. S. Jundia, "Financial performance based on the local government budget: Case study East and Central Java Provincial Governments," *J. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 10, no. 1, pp. 150–167, 2024, doi: 10.26905/ap.v10i1.12202.
- [8] M. A. P. Dyta, Nurhasanah, and Choiruddin, "Financial performance analysis of regional governments: A study of South Sumatra Province in 2019–2023," *Indones. Interdiscip. J. Sharia Econ.*, vol. 9, no. 1, pp. 9744–9749, 2026.
- [9] F. P. Sari and H. Hawignyo, "Pengaruh kepercayaan dan persepsi risiko terhadap keputusan pembelian online shop Tokopedia," *COSTING J. Econ. Bus. Account.*, vol. 4, no. 2, pp. 755–763, 2021.
- [10] R. Alfansa and P. Wibowo, "Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19," *J. Akt. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 3, pp. 150–168, 2022.
- [11] A. Fatma and S. U. Ismanto, "Analisis pendapatan daerah dalam mengukur kemandirian daerah Kabupaten Bandung," *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 5, no. 10, pp. 4018–4028, 2024.
- [12] F. A. Nugroho, Romandhon, and Susanti, "Analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah di Kabupaten Wonosobo tahun 2020–2024," *J. Akunt.*, vol. 20, no. 2, pp. 30–47, 2025.
- [13] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [14] A. Mutsalisah, A. Kusumastuti, and A. Zaimatunnisa, "Analisis efektivitas dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021–2023," *Pros. Natl. Semin. Accounting, Financ. Econ. (NSAFE)*, vol. 5, no. 1, pp. 116–123, 2025.
- [15] P. Sahindra, S. Sundari, and S. Margiatin, "Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018–2023," *INVESTASI Inov. J. Ekon. dan Akunt.*, vol. 2, no. 4, pp. 221–233, 2024.
- [16] M. Mujiyanti and P. N. Safitri, "Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan realisasi APBD Provinsi

-
- Banten periode 2017–2023,” *J. Akunt. dan Manaj. Bisnis*, vol. 5, no. 02, pp. 12–17, 2025.
- [17] Mardiasmo, “Akuntansi sektor publik,” 2018, *Andi*.
- [18] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.
- [19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [20] Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [21] R. S. Juliaha and P. Penangsang, “Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2019–2023,” *J. Nirta Stud. Inov.*, vol. 4, no. 1, pp. 34–45, 2024.